

REVITALISASI MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN PANCASILA

Ilham Nawawi¹, Siti Maulidiyah², Zaenul Slam³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

nawawiilham879@gmail.com¹, sitimaulidiyah0604@gmail.com², zaenul_slam@uinjkt.ac.id³

ABSTRACT; This article emphasizes that the Revitalization of Pancasila Education is an effort to revive and strengthen the teaching process, implementation of practices, policies, and school culture that respect, appreciate, and utilize diversity—whether in terms of religion, ethnicity, language, social class, gender, or individual abilities. The Revitalization of Pancasila Education is a very important strategic step in facing various challenges such as social disintegration, intolerance, and the decline of national values amid the current globalization. In essence, Pancasila Education does not only function as a means of conveying ideological knowledge, but also as an instrument of character formation that fosters an attitude of respect for differences in ethnicity, religion, culture, and language. Through the application of a multicultural approach, Pancasila values such as just and civilized humanity, the unity of Indonesia, and social justice can be internalized and applied contextually in the lives of students. This revitalization effort requires adjustments to the curriculum direction, innovation in learning methods, and optimization of the role of educators to be able to instill the values of tolerance, inclusivity, and social justice in a concrete manner. In addition, the integration of multicultural education into Pancasila Education plays an important role in strengthening national awareness while building students' moral resilience against the negative impacts of globalization and potential identity conflicts.

Keywords: Revitalization, Multiculturalism, Pancasila Education, National Values, Tolerance.

ABSTRAK; Artikel ini menekankan bahwa Revitalisasi Pendidikan Pancasila merupakan sebuah upaya untuk menghidupkan kembali sekaligus memperkuat proses pengajaran, pelaksanaan praktik, kebijakan, serta budaya sekolah yang menghormati, menghargai, dan memanfaatkan keberagaman—baik dalam aspek agama, etnis, bahasa, kelas sosial, gender, maupun kemampuan individu. Revitalisasi Pendidikan Pancasila menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan seperti disintegrasi sosial, sikap intoleransi, dan kemerosotan nilai-nilai kebangsaan di tengah arus globalisasi. Pada hakikatnya, Pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan ideologis, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter yang menumbuhkan sikap menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Melalui penerapan pendekatan multikultural, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial dapat dihayati dan diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan peserta didik. Upaya revitalisasi ini menuntut adanya penyesuaian arah kurikulum, inovasi metode pembelajaran, serta optimalisasi peran

pendidik agar mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial secara konkret. Selain itu, pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam Pendidikan Pancasila berperan penting dalam memperkuat kesadaran kebangsaan sekaligus membangun ketahanan moral peserta didik terhadap dampak negatif globalisasi dan potensi konflik identitas.

Kata Kunci: Revitalisasi, Multikulturalisme, Pendidikan Pancasila, Nilai Kebangsaan, Toleransi.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus intoleransi masih kerap muncul di lingkungan sekolah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah tindakan perundungan dan kekerasan antarsiswa yang dipicu oleh perbedaan latar belakang agama maupun budaya. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, di mana seorang siswa sekolah dasar meninggal dunia akibat mengalami perundungan dan pemukulan oleh kakak kelasnya. Berdasarkan laporan, tindakan kekerasan tersebut diduga terjadi karena korban memeluk agama yang berbeda dengan para pelaku. (Harkirtan Kaur, 2025). Peristiwa ini mencerminkan bahwa nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi identitas utama bangsa Indonesia belum sepenuhnya tertanam dalam perilaku peserta didik. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Pancasila belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk karakter multikultural yang menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi di kalangan siswa.

Permasalahan utama yang muncul adalah pembelajaran Pendidikan Pancasila masih berfokus pada hafalan dan teori. Nilai toleransi persatuan dan kemanusiaan sering hanya dipahami sebagai konsep. Peserta didik belum mampu menerapkan nilai tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial yang beragam. Selain itu budaya sekolah belum sepenuhnya mendukung sikap inklusif dan ruang dialog antarkelompok sehingga potensi diskriminasi tetap ada. (Nawawi, 2025)

Tulisan ini menghadirkan pendekatan yang menekankan perlunya revitalisasi multikulturalisme dalam setiap aspek penyelenggaraan Pendidikan Pancasila. Bukan hanya memperkuat materi tetapi juga menghidupkan penerapan nilai multikultural dalam kegiatan belajar, pola interaksi di sekolah, dan hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian pembentukan karakter tidak lagi sebatas ranah pengetahuan tetapi diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. (Maulidiyah, 2025)

Tujuan penulisan ini adalah mengkaji pentingnya revitalisasi multikultural dalam Pendidikan Pancasila sebagai upaya menciptakan sekolah yang toleran dan menghargai keberagaman. Selain itu tulisan ini memberikan rekomendasi strategi penerapan multikulturalisme agar nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan peserta didik. (Nawawi, 2025)

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar pada cara peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Informasi yang sangat mudah diakses membuat nilai dan budaya dari luar masuk tanpa filter. Banyak siswa menyerap nilai tersebut tanpa kemampuan menyaringnya. Kalidjernih dan Winarno (2019) menjelaskan bahwa kondisi ini memengaruhi cara berpikir generasi muda. Mereka cenderung mengutamakan diri sendiri dan kurang peka terhadap lingkungan sosial. Sikap seperti ini bertentangan dengan nilai Pancasila yang mengajarkan kebersamaan dan gotong royong.

Selain itu kemampuan literasi kritis di kalangan siswa masih rendah. Mereka sering mempercayai informasi di media sosial tanpa mengecek kebenarannya. Hal ini memicu prasangka dan memunculkan kesalahpahaman antar kelompok. Banks (2002) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural perlu membantu peserta didik mengenali penyebab munculnya prasangka serta mendorong mereka membangun sikap terbuka dan tidak mudah terprovokasi.

Keberagaman di sekolah tidak hanya berkaitan dengan suku atau agama. Ada pula perbedaan kemampuan fisik latar belakang keluarga maupun minat belajar. Sekolah perlu menyediakan ruang yang adil bagi semua peserta didik. Khairah (2020) menegaskan bahwa pendidikan multikultural harus menghadirkan ruang belajar yang menghargai perbedaan dan memberi kesempatan yang sama kepada peserta didik tanpa membedakan latar belakang mereka.

Revitalisasi Pendidikan Pancasila juga perlu memperhatikan peran guru. Guru tidak cukup hanya menyampaikan teori. Mereka harus mampu membimbing siswa melalui contoh nyata dan sikap sehari hari. Rahmawati (2014) menjelaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kelas yang mendorong dialog dan kerja sama. Guru juga berperan menjaga agar tidak ada bentuk diskriminasi dalam proses pembelajaran.

Penguatan karakter menjadi bagian penting dari pembaruan Pendidikan Pancasila. Nilai seperti kejujuran tanggung jawab dan kepedulian sosial harus dilatih melalui kegiatan nyata. Penelitian Meli, Nurdin dan Yudianto (2025) menunjukkan bahwa pembinaan karakter yang

dilakukan secara terus menerus dapat membantu remaja memahami nilai Pancasila secara lebih mendalam. Mereka tidak hanya menghafal tetapi juga mempraktikkannya setiap hari.

Dengan melihat berbagai tantangan tersebut Pendidikan Pancasila perlu diarahkan pada model pembelajaran yang lebih sederhana dan mudah diterapkan. Nilai dalam setiap sila harus dihubungkan dengan pengalaman nyata siswa. Kurikulum juga perlu memberi ruang agar siswa dapat belajar melalui kegiatan proyek kunjungan sosial permainan edukatif dan dialog antar kelompok. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan inklusif sehingga setiap peserta didik merasa dihargai apa pun latar belakangnya. (Nawawi, 2025)

Revitalisasi multikultural dalam Pendidikan Pancasila diharapkan dapat membentuk generasi muda yang mampu hidup dalam keberagaman. Mereka diharapkan tumbuh sebagai pribadi yang menghargai perbedaan dapat bekerja sama dan mampu menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Dengan demikian Pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi mata pelajaran tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah yang hadir dalam sikap dan tindakan seluruh warga sekolah. (Maulidiyah, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena sosial berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan maupun berbagai sumber lainnya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman makna, nilai, serta realitas yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan atau berita resmi yang berkaitan dengan tema multikulturalisme dan Pendidikan Pancasila di sekolah. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kondisi aktual penerapan nilai-nilai multikultural dalam dunia pendidikan serta merumuskan strategi revitalisasi yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan saat ini.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan intoleransi di lingkungan pendidikan serta upaya penguatan Pendidikan Pancasila melalui implementasi nilai-nilai multikultural. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengungkap fakta yang ada, tetapi juga menafsirkan makna serta implikasi temuan tersebut bagi pengembangan pendidikan karakter di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Pemahaman Pancasila**

Pancasila merupakan ideologi, pandangan hidup, dan falsafah bangsa yang wajib dijadikan pedoman. Nilai-nilai yang termuat di dalamnya harus diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara sebagai upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Namun, prinsip-prinsip yang dahulu diperjuangkan para pendiri bangsa kini tengah berhadapan dengan berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri sepanjang perjalanan sejarah bangsa. Arus globalisasi dan euphoria reformasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan, membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku generasi muda dalam menanggapi persoalan kebangsaan. (Nurholis et al., 2022)

Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan — Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika — semakin terabaikan dan mulai tergerus. Munculnya berbagai nilai baru yang tidak selaras dengan karakter bangsa menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan identitas nasional. Lebih jauh lagi, ketika nilai-nilai tersebut tidak dipahami secara menyeluruh, nilai-nilai dasar yang selama ini membentuk kepribadian bangsa justru mulai diabaikan. Kondisi ini dapat menyebabkan generasi muda semakin menjauh dari Pancasila yang menjadi identitas nasional sekaligus landasan persatuan.(Nurholis et al., 2022)

Persepsi serta sikap masyarakat mengenai posisi, peran, dan kedudukan Pancasila menunjukkan adanya keselarasan dalam menjalankan kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Pemahaman mengenai multikulturalisme di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh beragam suku bangsa yang memiliki komitmen bersama untuk memajukan negara. Komitmen tersebut tercermin melalui lambang negara Garuda Pancasila, yang menggambarkan bahwa kehidupan berbangsa memerlukan syarat penting berupa sikap toleransi sebagai wujud penghargaan dan respek terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan memahami dalam kehidupan bermasyarakat. (Nurholis et al., 2022)

Pancasila memberikan pemahaman bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk harus dipelihara melalui pendekatan multikultural agar interaksi dan integrasi sosial berjalan harmonis. Pendekatan ini berperan dalam menumbuhkan solidaritas, toleransi, kemanusiaan serta semangat berdemokrasi. Dalam kerangka pembahasan ini, kajian diarahkan pada berbagai tantangan yang muncul dari dinamika multikultural di Indonesia, terutama yang dihadapi oleh generasi muda atau mahasiswa sebagai bagian dari kelompok masyarakat terdidik yang diharapkan dapat menguasai dan memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam. (Nurholis et al., 2022)

Pemahaman terhadap pendidikan multikultural menjadi langkah strategis untuk mencegah potensi konflik yang timbul akibat keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi makna hakiki setiap sila Pancasila agar dapat memahami esensinya dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kepribadian bangsa dan kehidupan bernegara. Kelima sila Pancasila menjadi cita-cita dasar bangsa yang mencerminkan kesamaan antar manusia tanpa memandang perbedaan ras atau warna kulit, dan bersifat universal. (Nurholis et al., 2022)

Salah satu nilai penting dalam Pancasila, yakni semangat gotong royong, yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, kini menghadapi tantangan di era modern. Nilai ini yang dulu ditemukan kembali oleh Soekarno sebagai inti Pancasila, kini mulai luntur karena munculnya sikap elitis, etnosentrism, dan separatis di tengah masyarakat. Gotong royong yang dahulu menjadi kekuatan utama bangsa kini memudar seiring dengan perubahan zaman. Padahal, seperti dijelaskan oleh Dewantara (2015), konsep gotong royong yang digagas Soekarno berangkat dari pengalaman sosial masyarakat Indonesia yang sejak dahulu hidup dengan semangat kebersamaan. (A, W., 2015)

Sejalan dengan hal tersebut, Supriyono (2020) menegaskan bahwa Pancasila, sebagai fondasi sekaligus ideologi negara, merupakan milik seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memahami makna Pancasila dan menginternalisasi nilai-nilainya sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Adha, M, M., 2020)

Dalam konteks masyarakat multikultural, penyelenggaraan pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun tatanan sosial yang harmonis. Dibutuhkan langkah yang sistematis, terintegrasi, tersusun, serta terus-menerus untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila

melalui pengokohan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada lembaga pendidikan resmi mulai mulai jenjang dasar sampai pendidikan tinggi, serta melalui jalur nonformal melalui kegiatan kemasyarakatan. (Nurholis et al., 2022)

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan nasional yang berperan besar dalam mengembangkan kepribadian peserta didik dan warga bangsa yang baik. Tujuan utamanya adalah mewujudkan warga bangsa yang menguasai pengetahuan, memiliki sikap, serta menunjukkan tindakan selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, hukum serta kaidah-kaidah sosial yang berlaku di tengah keragaman bangsa. (Nurholis et al., 2022)

Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan wujud nyata dari asas kebhinekaan, yang meskipun berbeda-beda tetap menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, PKn berperan sentral dalam memperkuat identitas nasional dan memperkokoh persatuan bangsa. Revitalisasi Pancasila serta penguatan PKn di sekolah formal menjadi langkah strategis dalam memperkuat masyarakat Indonesia yang multikultural. (Nurholis et al., 2022)

Dalam konteks yang lebih luas, Pendidikan Kewarganegaraan dipahami sebagai *citizenship education* dengan perspektif warga global era modern saat ini. Warga negara modern saat ini ditandai oleh delapan poin utama, yaitu: kemampuan memahami dan menganalisis persoalan baik baik pada lingkup nasional maupun global; kemampuan berkolaborasi serta menunjukkan sikap tanggung jawab; sikap toleran; kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis; kemampuan mengatasi perselisihan dengan cara damai; partisipasi berperan dalam aktivitas sosial pada tingkat komunitas, nasional, maupun kenegaraan; pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat bernegara; dan tekad guna menyesuaikan pola hidup dengan tuntutan zaman. (Nurholis et al., 2022)

2. Upaya Strategis dalam Meningkatkan Kesadaran Kebhinekaan melalui Pendekatan Multikultural

Pendidikan berperan sebagai sarana yang efektif dalam menciptakan perubahan sosial, termasuk dalam menumbuhkan kesadaran akan kebhinekaan melalui pendekatan multikultural. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan kebebasan yang disertai tanggung jawab bagi seluruh pelaku pendidikan. Pendekatan multikultural dikembangkan dengan tujuan mananamkan sikap saling menghormati dan menghargai antarindividu yang

memiliki latar belakang sosial, budaya, dan sejarah yang beragam, sehingga kelompok minoritas pun memperoleh pengakuan yang layak. (Khairah, 2020)

Menurut Sitaresmi, penerapan multikulturalisme dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, secara langsung dengan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai multikultural. Kedua, secara tidak langsung, misalnya melalui cerita, dongeng, atau media lain yang memuat pesan-pesan multikultural. Selain itu, nilai-nilai multikultural dapat pula diintegrasikan dalam kegiatan formal maupun nonformal. (W. W. D, 2014)

Kesadaran terhadap kebhinekaan dapat ditanamkan melalui beberapa dimensi. Pertama, dimensi integrasi isi atau materi (*content integration*), yaitu dengan menghadirkan refleksi tentang pentingnya kebhinekaan dalam setiap proses pembelajaran. Kedua, dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*), yakni dengan menyusun kebijakan pendidikan yang memasukkan nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum. Ketiga, dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*), yang menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan merupakan sumber pembelajaran, bukan sumber perpecahan. Keempat, dimensi pendidikan yang adil dan setara (*equitable pedagogy*), di mana seluruh peserta didik memperoleh kesempatan dan fasilitas pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Kelima, dimensi pemberdayaan budaya kampus dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*), yaitu dengan mengoptimalkan potensi budaya mahasiswa dari berbagai latar belakang serta membangun struktur sosial kampus yang inklusif. Melalui pemberdayaan ini, kesadaran akan kebhinekaan dapat berkembang dengan baik. (James A. Banks, 2002: 14).

Upaya strategis lainnya untuk menumbuhkan kesadaran kebhinekaan antara lain: Pertama, menumbuhkan semangat kekeluargaan (*fraternity*) melalui musyawarah dalam penyelesaian masalah. Kedua, meningkatkan solidaritas sosial (*solidarity*) dengan saling membantu dan berbagi kepada yang membutuhkan. Ketiga, menerapkan prinsip keadilan (*justice*) dengan pembagian tugas yang sesuai fungsi tanpa pembedaan. Keempat, menjunjung kesetaraan (*equality*), di mana setiap individu diperlakukan sama tanpa pengecualian. Kelima, menjamin kebebasan (*liberty*) dalam mengembangkan potensi diri tanpa pembatasan. Keenam, menyediakan peluang dan kesempatan (*opportunity*) yang sama bagi semua individu untuk meraih prestasi. Kebiasaan menerapkan nilai-nilai tersebut akan mendorong tumbuhnya kesadaran kebhinekaan baik dalam konteks formal maupun nonformal. (Setyaningsih, 2021)

Dengan demikian, strategi peningkatan kesadaran kebhinekaan harus memperhatikan keberagaman yang ada dalam berbagai kelompok dan elemen masyarakat. Sikap etnosentrisme dan fanatisme golongan perlu dihindari agar tidak menimbulkan sikap eksklusif yang menghambat keharmonisan sosial. Sebaliknya, diperlukan pembentukan karakter yang terbuka dan menghargai perbedaan sebagai dasar dalam mewujudkan kehidupan yang berbhineka. (R., 2013)

3. Multikulturalisme, Masyarakat Madani, Dan Pendidikan Kewargaan

Pandangan dunia multikultural sejatinya bukanlah hal baru bagi Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kebudayaan dan kelompok masyarakat yang beragam, seluruhnya tetap menyatu dalam satu kesatuan yang utuh sebagai dasar wawasan kebangsaan. Pembentukan masyarakat multikultural yang berlandaskan wawasan kebangsaan tidak dapat terjadi secara spontan ataupun coba-coba, melainkan harus dilakukan dengan upaya yang terencana, sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan dipercepat melalui berbagai strategi. Salah satu strategi utama yang dapat mempercepat proses ini adalah penerapan pendidikan multikultural di berbagai lembaga pendidikan — baik formal, nonformal, maupun informal yang tersebar di masyarakat luas. (Azra & Azyumardi, 2004)

Kebutuhan dan urgensi pendidikan multikultural sebenarnya telah lama dirasakan, khususnya oleh negara-negara dengan masyarakat majemuk. Di beberapa negara Barat seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat, yang semakin multikultural pasca Perang Dunia II akibat migrasi penduduk, pendidikan multikultural mulai menemukan momentumnya pada dekade 1970-an. Di Amerika Serikat, sebelumnya dikenal pendidikan interkultural yang kemudian berkembang menjadi pendidikan multikultural, seiring meningkatnya keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, paradigma, konsep, dan praktik pendidikan multikultural menjadi semakin relevan dan tepat waktu. (Azra & Azyumardi, 2004)

Sebaliknya, bagi Indonesia, gagasan pendidikan multikultural masih tergolong baru. Meskipun belakangan mulai muncul wacana dan gagasan mengenai penerapan pendidikan multikultural di tanah air, diskursus publik mengenai hal ini belum berkembang luas dan referensi atau literatur yang membahasnya pun masih sangat terbatas. Padahal, melihat kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia yang dinamis serta sering diwarnai konflik pada berbagai

level masyarakat, kebutuhan terhadap pendidikan multikultural menjadi semakin mendesak. (Azra & Azyumardi, 2004)

Keragaman atau kebhinekaan merupakan realitas utama dalam kehidupan sosial dan budaya, baik di masa lalu maupun masa kini, bahkan akan terus berlanjut di masa depan. Secara sederhana, multikulturalisme dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa suatu negara atau masyarakat memiliki keragaman budaya di dalamnya. Tidak ada satu pun negara di dunia yang hanya memiliki satu kebudayaan nasional tunggal. Namun demikian, keragaman tidak boleh diartikan secara sempit. Pengakuan terhadap keragaman budaya tidak berarti menimbulkan keterpisahan, relativisme budaya, disrupti sosial, atau konflik berkepanjangan di antara kelompok masyarakat. Sebaliknya, di tengah perbedaan, selalu ada simbol, nilai, struktur, dan lembaga sosial yang menjadi perekat bagi kehidupan bersama. (Azra & Azyumardi, 2004)

Berbagai lembaga, struktur sosial, serta pola perilaku yang mencerminkan kerja sama, kolaborasi, mediasi, dan negosiasi menjadi sarana penting dalam menyelesaikan perbedaan dan mencegah konflik sosial. Nilai-nilai, simbol, dan struktur tersebut menekankan pentingnya kehidupan bersama yang saling mendukung, menghormati, dan mengakui hak serta kewajiban setiap individu maupun kelompok dalam konteks masyarakat nasional. (Azra & Azyumardi, 2004)

Dalam hal ini, komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai bentuk eksklusivisme sosial atau superioritas budaya, melainkan sebagai wujud penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Kerangka berpikir ini menekankan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap hak individu dan kelompok, serta pengakuan terhadap kemanusiaan sebagai inti kebudayaan. Oleh karena itu, multikulturalisme dapat dipahami sebagai keyakinan terhadap normalitas dan penerimaan atas keberagaman. (Azra & Azyumardi, 2004)

Pandangan multikultural semacam ini dapat dijadikan titik awal dan fondasi bagi pembentukan warga negara yang berkeadaban. Dalam konteks ini, multikulturalisme berfungsi sebagai dasar budaya bagi kehidupan kewargaan, kewarganegaraan, dan sistem pendidikan. Multikulturalisme sebagai landasan budaya juga berkaitan erat dengan pencapaian civility atau keadaban yang menjadi unsur pokok dalam demokrasi yang beradab (*democratic civility*). (Azra & Azyumardi, 2004)

Dalam upaya menumbuhkan *democratic civility*, masyarakat madani atau *civil society* (CS) dan dunia pendidikan memegang peranan penting. Namun, terdapat pandangan keliru bahwa *civil society* selalu identik dengan demokrasi dan keadaban. Kenyataannya, sebagian organisasi masyarakat madani masih terbentuk berdasarkan perbedaan sosial, budaya, etnis, dan agama, yang justru berpotensi menimbulkan eksklusivisme dan sikap merasa paling benar sendiri. Kondisi ini bisa berakibat kontraproduktif, tidak hanya terhadap multikulturalisme, tetapi juga terhadap demokrasi itu sendiri. (Azra & Azyumardi, 2004)

Oleh karena itu, *civil society* perlu dikembangkan menjadi lebih inklusif, toleran, dan menghargai pluralitas, serta mampu melintasi batas etnis, agama, dan sosial. Dengan demikian, *civil society* dapat berfungsi sebagai modal sosial dan budaya (*social and cultural capital*) yang penting untuk memperkuat keadaban dan demokrasi. (Azra & Azyumardi, 2003)

Dalam konteks pengembangan *social and cultural capital* ini, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis. Modal sosial dan budaya sangat penting bagi terciptanya kohesi sosial dan budaya, yang pada akhirnya akan memperkuat integrasi bangsa. Sebaliknya, tanpa adanya modal sosial dan budaya yang kuat, negara berpotensi mengalami disintegrasi. (Azra & Azyumardi, 2003)

Untuk membangun *social and cultural capital* tersebut, tidak cukup hanya dengan meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan masyarakat. Di sinilah letak pentingnya peran pendidikan. Melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewargaan (*civic education*), nilai-nilai sosial, budaya, kemanusiaan, serta prinsip demokrasi dapat ditanamkan dan dikembangkan. (Azra & Azyumardi, 2004)

Keadaban dan demokrasi tidak dapat tumbuh dengan sendirinya atau melalui proses coba-coba. Keduanya harus dirancang dan diimplementasikan secara konseptual, menyeluruh, dan berkelanjutan di semua jenjang serta lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal, nonformal, maupun informal seperti institusi pendidikan yang meliputi jalur pendidikan resmi, nonresmi, dan berbasis komunitas. Lebih dari itu, pembelajaran kewargaan juga menjadi wahana untuk menumbuhkan pengalaman langsung dalam berdemokrasi yang berkeadaban.(Azra & Azyumardi, 2004)

4. Pendidikan Moral (Karakter) Bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan

Pertama, pendidikan moral merupakan suatu proses di mana individu maupun kelompok sosial menurunkan dan menanamkan kepada generasi muda pandangan mereka tentang nilai-nilai yang dianggap benar maupun salah. Proses pendidikan moral dapat berlangsung melalui tiga jalur, yaitu secara formal (melalui lembaga resmi seperti sekolah atau perguruan tinggi), nonformal (melalui lembaga di luar pendidikan formal), dan informal (dalam lingkungan keluarga atau masyarakat secara umum). (Meli et al., 2025)

Kedua, pendidikan moral berfokus pada upaya membantu seseorang agar mampu memahami, mengembangkan, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika seperti budi pekerti atau akhlak. Melalui pendidikan ini, individu diharapkan dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah serta mampu mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang diyakini, meskipun menghadapi tekanan dari luar yang tidak berlandaskan alasan kuat. (Meli et al., 2025)

Ketiga, pendidikan karakter (*character education*) umumnya dilaksanakan secara formal di lembaga pendidikan seperti sekolah. Tujuannya adalah berkontribusi dalam memperkuat serta membangun komunitas melalui transformasi budaya dan penanaman nilai-nilai positif di lingkungan sekolah. (Meli et al., 2025)

Keempat, nilai-nilai utama yang diajarkan dalam pendidikan moral dan karakter mencakup berbagai aspek penting, antara lain membangun kepercayaan (*trustworthiness*), menumbuhkan rasa hormat dan harga diri, menegakkan keadilan, mengembangkan kedulian dan tanggung jawab, mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, menjadi pendengar yang baik, menyingkirkan prasangka negatif, mengelola tekanan, serta mengembangkan kerja sama dan persahabatan. (Meli et al., 2025)

Keselarasan terminologi antara pendidikan moral, pendidikan karakter, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan membantu kita memahami posisinya dalam kerangka model pendidikan demokratis di masyarakat yang telah maju. Namun, masih perlu dijelaskan lebih lanjut sejauh mana keterkaitan antara konsep kewarganegaraan dan demokrasi, agar dapat menuntun kita dalam menempatkan Pancasila sebagai landasan utama pendidikan bagi demokrasi di Indonesia. Bagian selanjutnya akan membahas hubungan antara demokrasi dan kewarganegaraan tersebut. (Meli et al., 2025)

5. Nilai-Nilai Pancasila yang Diinternalisasikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila telah diimplementasikan secara menyeluruh dan terpadu dalam praktik pembinaan karakter. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui kegiatan rutin seperti pelaksanaan ibadah lima waktu, kajian keagamaan, serta pelatihan akhlak Islami. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ditanamkan melalui kegiatan gotong royong, sikap saling menghormati, dan kegiatan refleksi moral dalam forum diskusi kelompok. Nilai Persatuan Indonesia tercermin dari terciptanya kohesi sosial di antara para remaja yang berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama, namun tetap hidup rukun di bawah satu sistem sosial panti. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diaplikasikan dalam proses pengambilan keputusan bersama, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan diskusi rutin yang mendorong partisipasi aktif para remaja binaan. (Khairah, 2020)

Sementara itu, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diterapkan melalui sistem pembagian tugas dan evaluasi yang seimbang, di mana setiap peserta memperoleh tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan pengawasan yang adil dari para pembina. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para remaja mulai menyadari pentingnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. (Khairah, 2020)

Selain itu, bukti dokumentasi seperti laporan evaluasi karakter, catatan kegiatan pembinaan, serta agenda kegiatan mendukung temuan bahwa proses internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada tataran teori atau ucapan semata, melainkan benar-benar tercermin dalam praktik kehidupan sosial yang kolektif, nyata, dan terarah. (Khairah, 2020).

KESIMPULAN

Dengan demikian, revitalisasi Pendidikan Pancasila harus diorientasikan pada pendekatan multikultural yang aplikatif melalui penguatan Pendidikan Kewarganegaraan. Tantangan globalisasi dan disrupti digital menuntut adanya pergeseran paradigma, dari pembelajaran yang kaku dan normatif menjadi sebuah gerakan pendidikan yang kontekstual dan partisipatif.

Inti dari revitalisasi ini adalah upaya mentransformasi Pancasila dari sekadar hafalan ideologi menjadi nilai-nilai karakter yang terinternalisasi dan menjadi panduan hidup kolektif. Ini berarti memastikan bahwa nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab,

serta semangat persatuan, tidak hanya dipahami di kelas, tetapi juga diamalkan dalam setiap interaksi sosial.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang berperspektif multikultural, peserta didik dibekali kemampuan untuk menghargai perbedaan, berdialog secara damai, dan mengelola keberagaman sebagai kekayaan. Dengan demikian, kita dapat menjamin bahwa *Bhinneka Tunggal Ika* bukan hanya slogan, tetapi terwujud sebagai praktik toleransi aktif, demi mewujudkan persatuan dan keadaban dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Egi Nurholis, Agus Budiman, Jeni Danurahman, (2022). *Revitalisasi Pancasila Sebagai upaya Memupuk Pemahaman Multikultural bagi Mahasiswa Universitas Galuh*
<https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/view/8941>
- Dewantara, A, W. (2015). *Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia*. Jurnal Philosophica et Theologica. 15(2), 109-126.
<https://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/53/48>
- Supriyono., Adha, M, M., (2020). *Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Masyarakat Multikultural*. Jurnal Kultur Demokrasi. 9(2), 52-61.
<https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/21518/14870>
- Wahyu Setyaningsih (2021). *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Kebhinnekaan Menuju Masyarakat Madani*
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita/article/view/4647/2492>
- Khairah. (2020). *Multikultural dalam Pendidikan Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4486/1/Buku%20Multikultural.pdf>
- Rahmawati, W. W. D. (2014). *Pendidikan Multikultural (Studi Kasus di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Tulungagung)*. In Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.36563/BONOROWO.V2I1.32>
- Ibrahim, R. (2013). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam*. In ADDIN (Vol. 7, Issue 1).
<https://doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>
- Meli, Erni Nurdin, Ahmad Yudianto, (2025). *Revitalisasi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Dalam Pembinaan Remaja Putus Sekolah*
<https://innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19883/13285>

Freddy K. Kalidjernih & WIarno Winarno , (2019). *Dari terminologi ke substansi pendidikan kewarganegaraan: Implikasi terhadap revitalisasi Pancasila*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 16(1), 38-50.
<https://scholarhub.uny.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=civics>

Azra, Azyumardi, (2003). “*From Civic Education to Multicultural Education with Reference to the Indonesian Experience*”, makalah pada “Multicultural Education in Southeast Asian Nations: Sharing Experiences”, Universitas Indonesia, 17-19 . (2004). “*Peradaban Indonesia: Akselerasi Multikulturalisme*”, makalah Seminar Nasional “*Perwujudan Masyarakat Multikultural dan Multikulturalisme dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*”, UIN Syarif Hidayatullah & Kementerian Kordinator Bidang Kesra, Jakarta

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3248912&val=28469&title=REVITALISASI%20WAWASAN%20KEBANGSAAN%20MELALUI%20PENDIDIKAN%20MULTIKULTURAL>